

# MEDIA KALTIMTARA

SABTU,  
2 SEPTEMBER  
2023

.COM

PASANG IKLAN  
HUBUNGI:  
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



## "SI PAYUNG EMAK KU" RAIH PENGHARGAAN INDONESIA AWARDS 2023

BACA HALAMAN 2



## RENCANA PELUASAN JARINGAN PDAM DI TANJUNG PALAS TIMUR

BACA HALAMAN 10

# Inovasi "Si Payung Emak KU" Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023



JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Awards 2023. Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Kaltara dalam kategori Informasi Birokrasi atas inovasi "Si Payung Emak KU" (Sistem Informasi Pusat Layanan Pengaduan, Konsultasi, dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Utara).

Penghargaan tersebut diterima dengan bangga oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, pada acara puncak Indonesia Awards 2023 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Jakarta pada, Kamis (31/8/2023).

"Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi kami, Pemprov Kaltara, untuk menerima penghargaan ini. Inovasi 'Si Payung Emak KU' adalah hasil kerja keras dan komitmen kami dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak-anak di wilayah Kaltara," ujar Gubernur Zainal A Paliwang.

Aplikasi "Si Payung Emak KU" tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian yang menimpa anak dan perempuan, tetapi juga memberikan jaminan keamanan terkait kerahasiaan data pelapor. Dengan fitur-fitur canggih yang dimilikinya, aplikasi ini mampu menangani serta mencegah berbagai permasalahan yang ada di tengah

masyarakat, menjadikannya sebagai alat yang efektif dalam upaya perlindungan.

Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperkuat inovasi "Si Payung Emak KU" guna meningkatkan kualitas perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

"Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi berbasis teknologi mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta perlindungan hak asasi manusia di wilayah Kaltara," pungkas Gubernur Zainal Paliwang. (dkisp)



Tersangka SP (31) ikut memusnahkan sabu.

## Sabu Seberat 485,35 gram Dimusnahkan BNNP Kaltara

TARAKAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara memusnahkan barang bukti sabu seberat 485,35 gram dengan cara dilarutkan dalam air kemudian dibuang ke kloset. Pemusnahan tersebut dilakukan di Kantor BNNP Kaltara Jl. Teuku Umar No.31, Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

"Barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari pengungkapan kasus di Kabupaten Nunukan pada 4 Agustus 2023," kata Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kaltara Kombes Pol Deden Andriana kepada awak di Tarakan, Kamis (31/8/2023).

Sabu terlebih dulu diuji untuk memastikan benar sabu atau bukan. Setelah dinyatakan positif mengandung

zat methamphetamine oleh tim dari Labkesda Tarakan, barulah sabu dimusnahkan.

Saat dilakukan pemusnahan dihadiri oleh tersangka berinisial SP (31) warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dan pihak Kejaksaan Negeri Tarakan. Tersangka SP yang tidak memiliki pekerjaan di Kaltara itu tinggal di Jalan Manunggal RT 15, Kecamatan Bunyu, Bulungan. Deden mengatakan saat SP datang ke Nunukan untuk mengambil sabu tersebut untuk dibawa ke Tanjung Selor, Bulungan.

Petugas BNNP Kaltara saat meringsus SP menemukan 10 bungkus plastik kristal putih diduga narkoba golongan I dengan berat kotor

487,35 gram yang disita dari tersangka. Saat penggeledahan barang bukti sabu ditemukan keganjilan, karena bukan sabu melainkan tawas yang dihaluskan.

Hasil koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kaltara akhirnya dilakukan pemisahan dan melakukan uji laboratorium yang hasilnya mendapatkan sembilan bungkus positif sabu dan satu bungkus tawas. "Disisihkan untuk laboratorium seberat 1 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara 1 gram, sehingga berat bersih yang dimusnahkan seberat 485,35 gram," kata Deden. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia  
Editor: Andhika



Wali Kota Tarakan, Khairul saat menerima Award dari Presiden Jokowi

HUMAS PEMKOT TARAKAN

## Selamat, Tarakan Raih TPID Award dari Presiden

**TARAKAN-** Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara Khairul menerima Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

“Saya terima kasih kepada seluruh unsur TPID Kota Tarakan dan para mitra kerja yang selama ini telah turut mengendalikan inflasi di Kota Tarakan,” kata Khairul.

Pemerintah Kota Tarakan terus berkomitmen untuk aktif dalam pengendalian inflasi, hal ini turut pula menjadi salah satu langkah strategis dalam terwujudnya Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui smart city.

Tim TPID Kota Tarakan yang diketuai oleh Wali Kota Tarakan Khairul, dinobatkan sebagai TPID Kabupaten/Kota terbaik Nasional tahun 2022 bersama kota Palembang, Banyuwangi, Bone dan Kupang.

TPID Tarakan juga memperoleh predikat kinerja terbaik di Kalimantan. Untuk diketahui, sepanjang 2022 lalu, inflasi di Tarakan terkendali di

angka 3,93 persen years-on-years (YoY), angka ini merupakan hal yang positif mengingat pemerintah pusat dan daerah tengah berupaya mengendalikan inflasi pada taraf serendah mungkin sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi terus tumbuh positif.

Angka inflasi Tarakan pun terkendali di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 5,52 persen YoY.

Pengendalian inflasi di Tarakan sendiri dilakukan dengan berbagai inovasi, termasuk dalam upaya pengendalian naiknya harga komoditas bahan pangan.

Pengendalian harga cabai pun menjadi sorotan pemerintah pusat di mana di Tarakan sekarang pasokan cabai lokal telah dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan warga Tarakan.

Prestasi ini juga menjadi salah satu penilaian dalam penentuan angka Dana Insentif Daerah (DID) oleh Pemerintah Pusat, yang nantinya akan diperoleh Pemkot Tarakan sebagai pendapatan daerah dalam APBD ta-

hun 2024 mendatang.

Secara total, Pemerintah telah menyiapkan Rp1 triliun yang akan dibagikan untuk para pemenang. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika





Rahmaddian, Direktur Universitas Terbuka Tarakan saat membuka turnamen E-Sport.

## 650 Peserta Ramaikan Turnamen E-Sport UT Tarakan Fest 2023

TARAKAN – 650 peserta se-Kalimantan Utara ikut meramaikan turnamen e-sport yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT) Tarakan. Turnamen e-sport akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September mendatang di kampus UT Tarakan.

Rahmaddian, Direktur Universitas Terbuka Tarakan mengatakan, turnamen ini menjadi wadah pengembangan sekaligus penjarangan bakat para pemain e-sport di Kaltara. Menurutnya, saat ini e-sport bukan sekedar permainan namun kini sudah menjadi turnamen yang diperlombakan ke kancah nasional bahkan internasional.

“Seperti yang saya katakan tadi kita memberi wadah kepada adik-adik yang punya hobi e-sport. Apalagi e-sport ini bukan permainan biasa namun sudah masuk ke kancah nasional maupun internasional. Karena permainan ini juga sudah masuk

PON,” tuturnya, Jumat (1/9/2023).

Rahmaddian menyebut tercatat ada 650 peserta ikut meramaikan turnamen e-sport. Turnamen ini, kata dia, terbuka untuk kalangan SMA dan umum se-Kalimantan Utara. Adapun turnamen e-sport yang diperlombakan yakni Mobile Legend, PUBG dan E-Football PS 4. “Tahun lalu kita adakan se Tarakan, tahun ini se-Kaltara. Ini juga merupakan penjarangan bakat untuk teman-teman yang punya skill,” ujarnya.

Adapun total uang pembinaan yang disiapkan sebesar Rp52 juta. “Kami siapkan uang pembinaan untuk setiap perlombaan itu beda-beda. Namun yang pasti total yang disiapkan Rp52 juta,” katanya.

Lanjutnya, UT Fest baru pertama kali diadakan dan rencananya akan dijadikan agenda tahunan di Kaltara. UT Tarakan Fest 2023 dilakukan se-

bagai upaya melestarikan budaya lokal dan menghadirkan kegiatan positif di kalangan pelajar serta lingkungan masyarakat. Selain turnamen e-sport, UT Tarakan Fest 2023 juga menggelar lomba musik dan tari.

Sementara itu, Ansar Ketua e-sports Indonesia (ESI) Tarakan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengadakan turnamen e-sport termasuk UT. Menurutnya, turnamen menjadi ajang penjarangan sehingga nantinya yang juara dapat dijadikan sebagai atlet ESI Tarakan. “Kalau nda ada turnamen teman-teman gak bisa berkembang. Karena melalui turnamen ini merupakan ajang pembuktian siapa yang hebat. Kalau nda ada turnamen kita agak berat mengasah skill,” ucapnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika





Foto bersama narasumber dengan peserta Workshop Pengawasan Partisipatif.

# Tingkatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kaltara Rangkul Mahasiswa

**TARAKAN-** Untuk mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Workshop Pengawasan Partisipatif di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (1/9/2023).

Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, Rustam Akif mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipatif dalam pengawasan Pemilu 2024.

“Kegiatan ini kami mengundang 100 peserta. Dan paling banyak perwakilan mahasiswa yang kehadirannya sekitar 80 persen,” ucapnya kepada awak media usai membuka kegiatan, Jumat (1/9/2023)

Rustam menyadari bahwa anggota Bawaslu sangat terbatas sehingga membutuhkan partisipasi dari masyarakat khususnya mahasiswa. Di Kota Tarakan misalnya, kata dia, anggotanya hanya sekitar 20. Sementara untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) hanya berjumlah 12 orang per kecamatan. Dengan jumlah yang terbatas itu, menurutnya pengawasan Pemilu 2024 tidak efektif.

“Harapan kita adalah bagaimana menciptakan pengawasan partisipatif. Dari semua rekan-rekan mahasiswa kami libatkan dalam

pengawasan partisipatif sesuai dengan tagline Bawaslu yakni “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Ini tujuan kita,” ucapnya.

Rustam lanjut menjelaskan, pengawasan partisipatif yang dimaksud adalah bagaimana mereka ikut membantu pengawasan. Minimal dengan memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar. Terlebih, ada sekitar 20 partai Caleg Partai di Pemilu 2024 sehingga perlu pengawasan.

“Belum lagi Caleg Provinsi dan RI yang akan turun sampai ke level bawah. Inilah harapan kita, mereka ikut membantu pengawasan pada saat kampanye dan lain lain. Artinya mengawasi sesuai aturan. Jadi kan

artinya ada aturan terkait dugaan pelanggaran, mereka bisa bantu mengawasi dan memberikan pemahaman bagaimana nantinya alur penanganan pelanggaran. Targetnya memberikan edukasi ke masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari sosialisasi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi dalam hal pengawasan pemilu. Hanya saja belum bisa dilakukan di semua Kabupaten atau Kota karena anggaran sangat terbatas. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia

Editor: Andhika





Arif Rochman Pimpinan Bawaslu Kaltara, Divisi HP2H.

## Bawaslu Tunggu Instruksi, Soal MK Perbolehkan Kampanye di Fasilitas Pendidika

**TANJUNG SELOR** - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi telah mengeluarkan putusan dengan Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang membolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye.

Dalam amar putusannya, menyatakan penjelasan pasal 280 ayat 1 Huruf H, undang-undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Sepanjang frasa fasilitas pemerintah tempat ibadah dan Tempat pendidikan dapat digunakan, jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu dan atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah tempat ibadah dan

fasilitas pendidikan, bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian di poin tiga, dalam amar putusan ini menyebutkan sepanjang tidak dimaknai mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud, dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Sehingga, pasal 280 ayat 1 huruf H UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, selengkapnya berbunyi, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Dikonfirmasi terkait adanya putu-

san ini, Bawaslu Kaltara mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh MK. Hal itu diungkapkan oleh Pimpinan Bawaslu Kaltara, Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Arif Rochman,

“Iya, kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan MK,” ujarnya.

Bawaslu selanjutnya menunggu intruksi atau regulasi baru, yang mengatur secara spesifik mengenai diperbolehkan berkampanye pada fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah. “Iya, termasuk metode kampanye yang seperti apa yang diperbolehkan, dan mungkin ini harus diatur secara detail,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



## Harga BBM Kembali Melejit, Masyarakat Siap-Siap Menjerit

**TANJUNG SELOR** - Kabar Mengejutkan bagi masyarakat Kalimantan, dan Indonesia pada umumnya. Bahwa, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan telah resmi menaikkan harga untuk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).

Pasalnya, kebijakan ini berlaku secara serentak se-Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 September 2023.

Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra menuturkan, penyesuaian dan penetapan harga BBM non subsidi mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor : 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar, yang disalurkan melalui SPBU atau Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

"Kita menyesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah," jelasnya, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (1/9/2023).

Selanjutnya, dia menerangkan untuk harga BBM jenis gasoil di wilayah Kalimantan. Dexlite (CN 51) naik di harga Rp 16.700 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter. Kemudian, Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp 13.500 per liter menjadi Rp 17.250 per liter.

Untuk harga BBM jenis gasoline Pertamina Turbo (RON 98) naik dari Rp 13.900 per liter menjadi Rp 16.250 per liter, dan Pertamina (RON 92) naik menjadi Rp 13.600 per liter sebelumnya, Rp 12.800 per liter.

"Penyesuaian harga ini, mengacu pada rerata Mean of Platts Singapore (MOPS) pada periode 25 Juli-24 Agustus. Harga baru ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen," tukasnya.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kalimantan dengan besaran PBBKB sebesar 7,5 persen. Menurutnya, harga produk Pertamina masih kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Sebab, telah memenuhi ketentuan batas atas pada periode September 2023 yang ditetapkan untuk setiap jenis BBM.

Kata dia harga BBM Pertamina, mempertimbangkan berbagai aspek. Diantaranya, tren harga publikasi MOPS atau Argus dan Kurs, agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Tanah Air.

Kemudian, untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Peralite. Dipastikan, harga tetap Rp 10.000 per liter. Begitu juga jenis BBM tertentu (JBT) Solar. "BBM jenis Solar masih sesuai yang ditetapkan pemerintah. yaitu Rp 6.800 per liter," bebarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, pengelola SPBU Sengkawait, James Ong Susanto mengaku sudah melakukan penyesuaian harga BBM untuk BBM non subsidi di Tanjung Selor, Kaltara. Kebijakan itu, secara serentak diberlakukan termasuk di Tanjung Selor Bulungan, Kaltara. "Betul, kita sudah terapkan, karena ini sifatnya serentak diberlakukan seluruh Indonesia," tandasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur  
Editor: Andhika





Bupati Bulungan Syarwani, saat diwawancarai oleh sejumlah awak media.

# Akselerasi Pembangunan Yang Merata, Terapkan Konsep Reforma Agraria

TANJUNG SELOR - Dalam rangka perwujudan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan daerah, pemerintah hadirkan konsep pembangunan berbasis reforma Agraria.

Terlebih dahulu dibentuk gugus tugas, sebagai upaya jajaran pemerintahan daerah, instansi vertikal serta kalangan akademisi melakukan pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Reforma agraria, merupakan Nawa Cita ke 5, berupa program Indonesia kerja dan Indonesia Sejahtera. Dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 8 juta hektare.

“Hal ini telah menjadi program prioritas nasional, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dilanjutkan pada 2020-2024,” ujar Bupati Bulungan, Syarwani kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Dia melanjutkan, reforma agraria

merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknis penataan aset dan penataan akses, sehingga penyelenggaraan reforma agraria perlu dukungan dan keterlibatan kementerian lembaga, termasuk dengan stakeholder terkait, dalam rangka tercapainya tujuan reforma agraria secara maksimal.

Dalam pertemuan yang diikuti gugus tugas, terdiri perangkat daerah Pemkab Bulungan, Dinas Pertanahan Bulungan serta Universitas Kaltara. Bupati melanjutkan, terdapat 5 agenda utama dalam pelaksanaan reforma agraria.

Pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. Kedua, penataan penguasaan dan pemilikan lahan, ketiga, kepastian hukum dan legalisasi aset atas tanah. Keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi serta kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.

Salah satunya, diimplementasikan

dengan pembentukan gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Bulungan. Hal ini, bertitik tolak pada Surat Keputusan Bupati (SKB) Nomor 188.45/426 tanggal 7 Juli 2023.

Rakor yang mengusung tema, Penguatan Hak Masyarakat di Lahan Transmigrasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Wujud Terciptanya Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Syarwani berharap, keberadaan gugus tugas reforma agraria bisa fokus pada kegiatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat.

“Selain itu, rakor ini juga dapat menjadi salah satu momentum semua pihak terkait, untuk saling bersinergi dan menyatukan persepsi untuk melaksanakan penyelenggaraan reforma agraria di Bulungan,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur  
Editor: Andhika



Kantor PDAM Danum Benuanta bersedia perluas layanan jika ditopang dengan infrastruktur yang memadai.

## Sumber Air Baku Jadi Kendala, Soal Rencana Perluasan Jaringan Intake PDAM di Tanjung Palas Timur

**TANJUNG SELOR** - Keterbatasan unit intake PDAM Danum Benuanta di Kabupaten Bulungan, belum sepenuhnya tersebar di 10 Kecamatan yang ada. Padahal, layanan air bersih dari PDAM sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menopang kebutuhan sehari-hari.

Salah satunya di Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang hingga saat ini belum terjangkau layanan air bersih. Direktur PDAM Danum Benuanta, Winardi mengatakan, pihaknya selaku perusahaan daerah bersedia memperluas jaringan layanan, ketika ditopang dengan sarana pendukung yang memadai.

“Kita bisa saja perluas jangkauan layanan, ke setiap kecamatan yang ada. Asalkan disiapkan infrastruktur pendukung dari pemerintah,” ucap Winardi.

Fasilitas pendukung yang dia maksud, salah satunya kesiapan em-

bung yang menjadi sumber air baku. Kemudian, penentuan lokasi yang akan di bangun intake PDAM. Termasuk dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti lahan dan sejenisnya yang menjadi kewenangan pemerintah.

Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan kajian soal perluas jaringan layanan PDAM harus disertai dengan ketersediaan air baku.

“Iya, kita harus persiapkan sumber air bakunya, terlebih dahulu,” ucap Syarwani.

Dan itu, lanjut Bupati Syarwani pemerintah memahami kondisi yang terjadi di Tanjung Palas Timur. Bahwa, masih kesulitan dalam pemenuhan sumber air baku, karena memang kultur geografis wilayah berada di pinggir pantai.

“Mudah-mudahan dari upaya yang ada, dimungkinkan distribusi

sumber air bakunya tidak mesti di Tanah Kuning atau Mangkupadi, tapi mungkin kita cari desa sebelumnya, seperti di Desa Sajau, Sajau Hilir atau Binai. Ini yang masih kita genjot untuk dimaksimalkan,” terangnya.

Karena memang, jarak tempuh antara Desa Binai dan Sajau itu relatif dekat. “Tapi, kalau kita hanya mengandalkan sumber air baku yang ada di dua desa ini, pastinya sangat terbatas, dengan kebutuhan masyarakat banyak,” ucap dia.

Sehingga, tidak menutup kemungkinan pasokan distribusi air kedepannya bisa didatangkan langsung dari Tanjung Selor, melihat kebutuhan dan permintaan masyarakat yang tinggi. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

*Lebih Dekat dengan Satu Klik*



# OIKN INTEGRASIKAN TEKNOLOGI AI UNTUK RENCANA KOTA CERDAS

**BACA HALAMAN 2-3**



## TIGA KESENIAN DARI KUKAR DAPAT PENGAKUAN NASIONAL

**BACA HALAMAN 30**



FOTO: TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE ROBIE MRG

Penampakan pembangunan di sumbu kebangsaan IKN pada Jumat (1/9/2023) pukul 18.07 WITA.

# OIKN Integrasikan Teknologi AI untuk Rencana Kota Cerdas

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menekankan akan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengembangan kota cerdas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (1/9), Deputy Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menyatakan bahwa kecerdasan buatan dapat berperan penting dalam mencapai efisiensi dalam

berbagai aspek kota cerdas.

Ali menjelaskan, kecerdasan buatan di Ibu Kota Nusantara dapat dimanfaatkan pada domain kota cerdas. "Khususnya efisiensi penerapan monitoring titik panas pada hutan dan sensor kelembaban, serta pengoperasian kendaraan listrik otonom," ucapnya.

Selain itu, Ali juga menyebutkan bahwa OIKN sedang mempertimbangkan pedoman terkait bangunan cerdas dalam rangka mendukung infrastruktur

dan aplikasi superapps di IKN.

Sementara itu, Ketua Umum Kolaborasi untuk Percepatan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia (KORIKA), Hammam Riza, mengekspresikan harapannya terhadap peran kecerdasan buatan. Hammam

Riza berpendapat bahwa AI harus dikembangkan dengan tujuan untuk membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja yang lebih kreatif dan handal.



“Selain itu, AI diharapkan dapat membawa kita menuju tahapan ekonomi dan kesejahteraan yang menyeluruh,” kata Hammam Riza.

Konsep kota cerdas telah menjadi elemen penting dalam rencana pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, dan siap menghadapi masa depan. Komponen kota cerdas dalam rencana ini bertujuan untuk memberikan manfaat digital dan teknologi yang lebih

besar bagi IKN secara keseluruhan.

Rencana strategis untuk mengimplementasikan kota cerdas melibatkan tiga unsur utama, yakni visi dan hasil yang sesuai dengan kerangka strategis IKN secara keseluruhan, strategi cerdas yang mengidentifikasi peluang digital utama, serta daftar inisiatif cerdas yang dapat mendukung perkembangan IKN.

Inisiatif cerdas yang diprioritaskan untuk IKN mencakup aspek akses

dan mobilitas, lingkungan hidup dan iklim, keamanan dan keselamatan, sektor publik, sistem perkotaan, serta kelayakan huni dan dinamis dalam rangka menciptakan kota cerdas yang unggul dan berkelanjutan di IKN Nusantara. (ant)

*Editor: Agus Susanto*





# MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PENDUKUNG RANGKAIAN ACARA **HUT MEDIA KALTIM KE-3**

HINGGA PADA ACARA PUNCAK MINGGU, 27 AGUSTUS 2023  
DI LAPANGAN EKS. BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

**THE TALK SHOW**  
**PARIWISATA KALTIM  
GO DIGITAL  
GO GLOBAL**  
KALTIM FEST - CONVENTION HALL SAMARINDA  
JUMAT 14 JULI 2023



**THE TALK SHOW**  
EKSISTENSI KOPI UKM DITENGAH  
DOMINASI KEDAI KOPI MODERN  
**CUAN DARI  
NGOPI**  
SABTU 15 JULI 2023 PKL. 14.00 - 16.00



**OPEN TOURNAMENT  
MINI SOCCER**  
MEDIA KALTIM CUP  
TENGGARONG, 11-13 AGUSTUS 2023



**PESCOMPETITION**  
TENGGARONG, 6 AGUSTUS 2023



**LOMBA  
VIDEO  
MEDSOS**



27 AGUSTUS 2023  
**JALAN  
SEHAT**





## Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023 untuk Inovasi “Si Payung Emak KU”

**JAKARTA** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Awards 2023. Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Kaltara dalam kategori Informasi Birokrasi atas inovasi “Si Payung Emak KU” (Sistem Informasi Pusat Layanan Pengaduan, Konsultasi, dan Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Utara).

Penghargaan tersebut diterima dengan bangga oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, pada acara puncak Indonesia Awards 2023 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Jakarta pada, Kamis (31/8/2023).

“Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi kami, Pemprov Kaltara, untuk menerima penghargaan ini. Inovasi ‘Si Payung Emak KU’ adalah hasil kerja keras dan komitmen kami dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak-anak di wilayah Kaltara,” ujar Gubernur Zainal A Paliwang.

Aplikasi “Si Payung Emak KU” tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian yang menimpa anak dan perempuan, tetapi juga memberikan jaminan keamanan terkait kerahasiaan data pelapor. Dengan fitur-fitur canggih yang dimilikinya, aplikasi ini mampu menangani serta mencegah berbagai permasalahan yang ada di ten-

gah masyarakat, menjadikannya sebagai alat yang efektif dalam upaya perlindungan.

Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperkuat inovasi “Si Payung Emak KU” guna meningkatkan kualitas perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

“Keberhasilan ini menjadi buktinya bahwa inovasi berbasis teknologi mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta perlindungan hak asasi manusia di wilayah Kaltara,” pungkas Gubernur Zainal Paliwang. (**dkisp**)



Junaidi

WAKIL KETUA

Andi Faizal S Hasdam

KETUA DPRD

Agus Haris, SH

WAKIL KETUA

H. Lukman, SS, M.Si

SEKRETARIS DPRD



ISTIMEWA

Masalah gaji karyawan PT LBB kerap kali terjadi. Pemkot diminta bertindak tegas.

## Gaji Karyawan PT LBB Kembali Nunggak, Andi Faiz Desak Pemkot Bertindak Tegas

**BONTANG** – Keterlambatan gaji karyawan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) mendapat sorotan legislatif. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendesak Pemkot Bontang, agar segera menindak tegas LBB, lantaran kejadian ini bukan pertama kali terjadi.

“Kasihan karyawannya tidak ada kepastian dalam mendapatkan hak-hak nya setiap bulan. Seperti gaji karyawan tidak dibayar, BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayar, dulu seperti ini juga dan terulang lagi,” ujar Andi Faiz beberapa waktu lalu.

Padaحال menurut Andi Faiz,

pendapatan PT. LBB cukup besar jumlahnya sekira Rp 500 juta. Baginya tak masuk akal jika perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawannya.

Pendapatan besar tapi tidak memiliki fasilitas penunjang kerja kantor, seperti laptop. Padahal jika LBB itu dikelola dengan baik, potensi pendapatan buat daerah disebut Andi Faiz sangat luar biasa jumlahnya.

“Hanya bermodal pulpen dan kertas saja sudah bisa mendapat cuan yang jelas. Sayang sekali kalau pengelolaan seperti ini trus dibiarkan. Kenapa tidak diganti saja ini PT.

LBB, pemkot harus tegas, kasihan karyawan-karyawannya,” tandasnya.

Diberitakan, PT LBB kembali menunggak gaji karyawannya. Sebanyak 23 karyawan PT LBB kembali mengeluhkan molornya pembayaran gaji di bulan Agustus ini.

Salah seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa tunggakan itu bukan hanya gaji tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2023.

“Seharusnya setiap tanggal 26 kita sudah gajian. Juli kemarin saja dipanjar dua kali,” ujarnya belum lama ini. (adv/al)





## Status Lahan di RT 02 dan 03 Bonles Terus Berpolemik, Legislatif Desak Pemkot Segera Selesaikan

**BONTANG**— Status lahan di wilayah RT 02 dan 03 Kelurahan Bontang Lestari (Bonles) masih terus berpolemik. Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris pun meminta pemerintah daerah segera melakukan kajian untuk segera menyelesaikan masalah.

Polemik status kepemilikan lahan itu antara Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu dengan warga bernama Yuli yang mengaku pemilik lahan tersebut

“Kami minta pemerintah segera mempertegas seperti apa status lahan yang berada di tengah kawasan Hutan Lindung (HL) itu,” ujarnya, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), beberapa waktu lalu.

Menurut Politisi Partai Gerindra itu, mengenai status lahan ini rentan terjadi polemik, lantaran pemerintah dinilai belum menata secara baik legalitas lahan yang dimiliki para petani-petani di lokasi tersebut.

“Melalui dinas terkait, harusnya pemerintah memberi arahan-arahan soal tata ruang lahan itu. Biar tidak ribut-ribut antar masyarakat kelom-

pok tani yang ada di sana,” timpalnya.

Perwakilan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, Ashir Budiono mengaku, pihaknya telah menggarap lahan di areal tersebut sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 pihaknya secara resmi melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintah.

“Setahu saya lahan yang kami garap itu tidak bisa diperjualbelikan, karena statusnya hutan lindung. Jadi pertanyaan kami apakah bisa status lahan hutan lindung itu dimiliki perorangan,” tanya Ashir.

Sementara itu, Yuli mengklaim pembukaan lahan itu telah dilakukan sejak tahun 1982 dan kemudian di tahun 1987 lahan seluas 2,5 hektar tersebut ia beli. Di Tahun 2021 lahan tersebut sudah diperkuat dengan putusan pengadilan.

“Suratnya segel dan sudah ada semua putusan pengadilannya,” terangnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Ishak mengungkap-

kan, jika dihitung dari bibir jalan sekitar 146 meter, maka sebagian besar lahan itu berpotensi masuk dalam kawasan hutan lindung. Namun ia belum bisa memastikan soal status lahan tersebut. Sebab, pihaknya belum melakukan kajian titik koordinat lahan secara langsung.

“Kalau sesuai data tahun 1982 kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung. Tapi akan kita kaji dulu titik koordinatnya untuk memastikan,” terangnya.

Dipertegas oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan, Endang Mustinah, bahwa status wilayah Bontang Lestari masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL). Sesuai aturan yang berlaku, pengelolaan HL tidak boleh dilakukan secara perorangan.

“Sementara kelompok tani yang diperbolehkan adalah kelompok tani hutan, yang diregistrasi Dinas Kehutanan melalui KPHP sebagai petugas lapangan. Jadi bukan kelompok tani pada umumnya, tapi kelompok tani hutan,” imbuhnya. (adv/al)



## Sopan Sopian Dorong Pembangunan dan Peningkatan Jalan serta Jembatan di Muara Muntai

**TENGGARONG** - Akhirnya, masyarakat dua RT di Desa Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar) dapat merasakan manfaat dari jalan yang mulus.

Perbaikan tersebut terjadi di RT 3 dan RT 5 setelah anggota DPRD Kukar Dapil 5, Sopan Sopian, berhasil mewujudkan aspirasinya berupa pembangunan badan jalan di wilayah tersebut.

Badan jalan sepanjang 200 meter ini ditingkatkan dengan peningkatan berupa semenisasi. Legislator yang berasal dari Partai Gerindra ini mengalokasikan anggaran pembangunan jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar.

"Iya, APBD Kukar tahun 2022 digunakan untuk mewujudkan ini, berdasarkan usulan dari Musrenbang Desa Muara Muntai Ulu," ungkap Sopan pada Jumat (1/9/2023).

Sopan tidak hanya memfokuskan pada perbaikan badan jalan saja. Saat ini, ia juga berupaya untuk melakukan pelebaran dan semenisasi pada jembatan-jembatan di Desa Muara Muntai Ulu. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi mengalami gangguan saat menggunakan akses jalan, baik di jalan darat maupun jembatan.

"Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat saat ini bahan baku kayu ulin semakin sulit ditemukan. Kita harus mencari alternatif konstruksi baru untuk menggantikan kayu ulin, seperti semenisasi," lanjut Sopan.

Saat ini, Sopan mengaku masih ada beberapa titik jalan lain yang menjadi target perbaikan. Namun, agar titik-titik tersebut dapat masuk dalam prioritas pembangunan jalan dan jembatan, perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Kukar, terutama mengingat kenaikan signifikan dalam APBD Perubahan Kukar 2023.

"Semua desa di sana mengutamakan permintaan untuk meningkatkan, melebarkan, dan semenisasi jalan-jalan. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi mas-

yarakat Muara Muntai, terutama dalam mengatasi masalah jembatan ulin yang mengganggu lingkungan," tutup Sopan. (adv)

*Penulis: Muhammad Rafi'i*

*Editor: Agus Susanto*



Peningkatan jalan dan jembatan di Kecamatan Muara Muntai.



## Optimisme Tinggi Capai Target RTLH Kukar Tahun Ini

### Pembangunan RTLH di Kukar

- Total 100 unit RTLH telah selesai dibangun hingga Agustus 2023.
- Terdapat total 231 unit RTLH dalam klaster 1.
- Klaster 1 mencakup Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan.

### Metode Pembangunan RTLH

- Pembangunan RTLH di Kukar melibatkan Kodim 0906/Kukar.
- Penggunaan metode swakelola dengan partisipasi masyarakat penerima manfaat.

### Target Tahun 2023

- Target tahun ini adalah menyelesaikan 1.010 unit RTLH.
- Meningkat dua kali lipat dari 512 unit yang selesai dibangun pada tahun 2022.

### Sasaran Pengurangan Kemiskinan

- Program RTLH merupakan bagian dari program nasional.
- Sasarannya adalah mengurangi kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024.

### Anggaran

- Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 5 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 4 miliar.

# 100 Unit RTLH di Kukar Rampung Dibangun

**TENGGARONG** - Hingga akhir Agustus 2023, kemajuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai 100 unit dari total 231 unit yang termasuk dalam klaster 1.

Klaster ini meliputi Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan.

Pembangunan RTLH di Kukar adalah hasil kolaborasi dengan Kodim 0906/Kukar dan dilakukan dengan metode swakelola bersama masyarakat setempat yang menjadi penerima manfaat. Pendekatan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sambil menyelesaikan klaster 1, pemerintah kabupaten saat ini sedang mempersiapkan pembangunan di kecamatan yang termasuk klaster 2. Pengadaan materialnya sudah masuk tahap pelaksanaan melalui aplikasi e-katalog. Begitu juga dengan wilayah kecamatan yang termasuk klaster 3. Pada tahun 2023 ini, targetnya adalah menyelesaikan sebanyak 1.010 unit RTLH, menggandakan angka dari tahun 2022 yang hanya menyelesaikan 512 unit RTLH.

"Kami berharap semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah bagian dari program nasional. Sasarannya adalah mengurangi kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024," ungkap Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP), Dinas Perkim Kukar, Andi Muhammad Yahya.

Mengenai kendala yang dihadapi, Muhammad Yahya menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah dalam verifikasi dan validasi data masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ditemukan bahwa beberapa orang yang terdaftar dalam DTKS dan P3KE telah mengalami peningkatan status ekonomi, sehingga diperlukan peninjauan ulang data mereka.

Sementara itu, dalam hal ketersediaan material, ia memastikan bahwa pasokannya cukup memadai, sehingga tugas Dinas Perkim Kukar lebih berfokus pada pendataan calon penerima manfaat.

Secara finansial, setiap rumah yang menjadi sasaran pembangunan akan menerima bantuan maksimal sebesar Rp 50 juta, yang akan dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan seperti atap, lantai, dan dinding. Dengan kata lain, jumlah bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang akan dibangun.

Total anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp 50 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp 40 miliar. "Pembangunan RTLH ini melibatkan tentara dari Kodim 0906/Kukar, dan tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat. Kami optimis bisa mencapai target tahun ini," tutup Muhammad Yahya. (adv)



Foto bersama saat di sela acara seminar gerakan sekolah menyenangkan.

## Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan, PT Berau Coal Gelar Seminar Gerakan Sekolah Menyenangkan

**TANJUNG REDEB** - Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Batiwakkal, PT Berau Coal bersama Komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) mengadakan Seminar Gerakan Sekolah Menyenangkan.

Berlangsung meriah dengan tema Hadirkan Perubahan Baru dalam Pendidikan. Seminar ini dihadiri kurang lebih 500 peserta, termasuk para tamu undangan, kepala sekolah, serta perwakilan guru SD dan SMP dari 248 sekolah se-Kabupaten Berau, di Hotel Bumi Segah, Rabu (30/08) lalu.

Rangkaian kegiatan kemudian

akan dilanjutkan dengan agenda workshop selama dua hari.

Bupati Berau, Sri Juniarsih dalam sambutannya membuka agenda ini, mengapresiasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT Berau Coal dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui Seminar GSM.

Pemerintah Kabupaten Berau mendukung program peningkatan kualitas pendidikan seperti ini dan memberikan apresiasi kepada PT Berau Coal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau atas penyelenggaraan seminar ini.

"Saya kira, Hal ini sejalan dengan visidan misi kami, yaitu meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur. Kami menyadari, sektor pendidikan adalah sektor yang sangat krusial, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas," paparnya.

Seminar ini diharapkan bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Berau, sehingga mampu menghadirkan metode pengajaran yang berkualitas, efektif, dan menyenangkan bagi para tenaga pendidik dan peserta didik. Bupati Sri Juniarsih menggandeng seluruh pihak untuk bersinergi memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan pendidikan di Bumi Batiwakkal.

Cahyo Andrianto, General Manager Operational Support & Relations PT Berau Coal, menjelaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Berau Coal. Melalui kerjasama dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan, PT Berau Coal berkomitmen mendukung program pemerintah wajib belajar 12 tahun serta meningkatkan partisipasi sekolah.

"Program ini awalnya kami mulai dengan menyasar sekolah-sekolah yang berada di lingkaran operasional PT Berau Coal, yang kemudian kami harapkan dapat meluas hingga ke seluruh sekolah di Kabupaten Berau," paparnya.

Sejak 2019, program GSM di beberapa sekolah yang berada di wilayah operasional PT Berau Coal telah menunjukkan perubahan positif. Program ini juga mencakup pelatihan guru, workshop, dan beberapa sekolah di Berau telah menerapkan GSM dengan dampak positif.

"Kegiatan GSM ini tidak hanya dilakukan di Berau Coal tapi juga telah dilakukan di lingkup grup Sinar Mas yang lain. Ini merupakan bentuk komitmen kepedulian Sinar Mas dan Berau Coal dalam mendukung pemerintah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Berau pada khususnya," terangnya.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada seluruh peserta dan tentu dapat menjadi modal untuk mengakselerasi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Berau. Ia juga berharap program ini bisa menghapus labelisasi bahwa menempuh pendidikan adalah suatu hal yang memberatkan.

"Kami harap inisiatif ini bisa menghapus label sekolah itu memberatkan. Sekaligus bisa meniadakan anggapan di kalangan pendidik bahwa mengajar anak semakin sukar. Tentu muaranya nanti kita harap bisa melahirkan SDM yang berkualitas dan handal," jelasnya.

Muhammad Nur Rizal, Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), mengapresiasi upaya PT Berau Coal dalam meningkatkan kualitas SDM melalui seminar GSM ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk kemajuan pendidikan.

Ia juga mengharapkan agar kegiatan ini dapat berjalan berkelanjutan dan peran PT Berau Coal dapat menjadi percontohan bagi perusahaan lain.

"Harapannya ini bisa diikuti perusahaan lainnya, perusahaan punya peran untuk membangun kualitas SDM. Sehingga nanti bisa berdampak lebih luas pada kualitas SDM yang ada di Berau," pesannya.

Pelatihan bervariasi, tak hanya pelatihan administratif melainkan juga yang sifatnya kualitatif. Revolusi mental pengajar juga penting untuk diselaraskan, bagaimana guru bisa memberikan dampak positif kepada para murid yang dibangun melalui kreativitas. Sehingga bisa muncul SDM yang tak hanya cerdas tetapi juga kritis.

Kepala Sekolah SDN 007 Tanjung Redeb, Rusmiati sebagai salah seorang guru yang pertama kali menerapkan GSM di Kabupaten Berau merasa bangga dan senang sekali dengan perubahan dampak positif yang terjadi di sekolahnya.

"Suasana di sekolah jadi lebih menyenangkan, para guru memberikan teladan dan afirmasi positif, siswa-siswa menjadi lebih bersemangat, tidak ketinggalan wali murid juga ikut terlibat dan merasakan perubahan positif pada anak-anaknya," ungkap Rusmiati.

Ia kemudian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada PT Berau Coal yang telah melakukan pendampingan program GSM sejak awal hingga saat ini komunitas GSM semakin berkembang dan menginspirasi banyak sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Berau. (adv)

Reporter: Dezwan



Suasana pertunjukan hiburan dalam acara gerakan sekolah menyenangkan.



## Siap Beroperasi, Bus Listrik Pupuk Kaltim Mejang di Peresmian BRT Bandung Raya

**KOMITMEN** PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dalam mendorong dekarbonisasi dengan menekan penggunaan energi fosil di lingkungan perusahaan, secara bertahap terus dikembangkan dengan memulai peralihan kendaraan operasional dari sebelumnya menggunakan BBM menjadi moda transportasi listrik.

Setelah diawali motor listrik, komitmen Pupuk Kaltim berlanjut dengan memulai penggunaan mobil listrik untuk operasional perusahaan yang berjalan sejak Juni 2023. Hal ini merupakan tindak lanjut program net zero carbon emission yang dikembangkan Pupuk Kaltim, sejalan dengan prinsip Environment, Social and Governance (ESG).

Dalam waktu dekat, perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara ini pun segera menambah unit transportasi operasional menggunakan bus listrik, yang kini tengah dalam persiapan dengan jenis MD 8E Cross Medium Bus dari pabrikan Mobil Anak Bangsa (MAB).

Bus ini memiliki panjang 8 meter dan kapasitas baterai LiFePO 560,28V 228 Ah dan 127,74 KWh dengan transmisi AMT 4 kecepatan. Memiliki ukuran sedang, bus ini lebih fleksibel di jalanan menyesuaikan kondisi jalanan perkotaan maupun luar jalan protokol berukuran lebar. Selain itu, Pupuk Kaltim juga akan menambah unit bus listrik dengan panjang 12 meter.



Wajah unit transportasi ramah lingkungan itu pun turut dipamerkan pada rangkaian peresmian Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Kota Baru Parahyangan Bandung Barat beberapa waktu lalu.

VP Pelayanan Umum Pupuk Kaltim Wirza Eka Putra, mengungkapkan penggunaan bus listrik dalam mendukung aktivitas dan operasional perusahaan, merupakan kesinambungan komitmen Pupuk Kaltim mengedepankan prinsip ESG dengan berbagai peningkatan program setiap tahun.

Dikatakan Wirza, setelah motor dan mobil listrik, kini saatnya Pupuk Kaltim bergerak cepat untuk pengadaan bus listrik sebagai kendaraan operasional, agar daya tampung unit antar jemput di lingkungan perusahaan bisa mengakomodasi lebih banyak penumpang. Hal ini mengingat mobilitas di kawasan perusahaan yang cukup intensif, sehingga sarana pendukung dengan kapasitas yang jauh lebih besar perlu disiapkan untuk kelancaran aktivitas.

“Saat ini bus masih tahap uji coba dan persiapan unit. Dalam waktu dekat baru akan dirilis dan dioperasikan sebagai tambahan sarana transportasi baru berbasis listrik di

kawasan perusahaan,” ucap Wirza, Kamis (31/8/2023).

Wirza menyebut Pupuk Kaltim secara bertahap akan terus memperbanyak kendaraan listrik guna menekan penggunaan bahan bakar fosil dalam operasional perusahaan. Kedepannya, langkah ini pun akan didukung penyediaan charging station berlisensi untuk pengisian daya seiring makin masifnya penggunaan.

“Pupuk Kaltim akan terus meningkatkan komitmen dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, sebagai langkah nyata penerapan ESG Perusahaan,” tambah Wirza.

SVP SDM Pupuk Kaltim Ardi Harto Mulyo, mengatakan Pupuk Kaltim secara konsisten terus berfokus terhadap penerapan ESG di lingkungan perusahaan, guna mencapai target Net Zero Emission pada 2060 dan Nationally Determined Contribution (NDC) hingga 32 persen di tahun 2030. Penggunaan kendaraan listrik merupakan bagian dari komitmen tersebut, khususnya realisasi net zero carbon emission, guna menekan penggunaan energi fosil di lingkup bisnis Perusahaan.

“Dari hal itu, pertumbuhan usaha yang menitikberatkan pada keseimbangan kinerja sesuai prinsip ESG

juga ditarget berjalan lebih maksimal dengan penggunaan kendaraan listrik secara bertahap,” papar Ardi.

Langkah tersebut pun menilik prestasi Pupuk Kaltim yang berhasil menduduki peringkat tertinggi penerapan ESG dunia untuk kategori agrochemical, berdasarkan ESG Risk Rating Morningstar Sustainalytics tahun 2023.

Dimana serangkaian program dalam menekan emisi karbon dilaksanakan secara komprehensif dengan berbagai pengembangan, seperti green ammonia, pembangunan pabrik soda ash, community forest hingga pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Penggunaan mobil listrik juga upaya Pupuk Kaltim menjawab tantangan industri masa kini, dengan terus menggali inovasi untuk menerapkan praktik bisnis secara berkelanjutan. Sehingga manfaat tak hanya berdampak bagi pertumbuhan usaha, tapi juga menitikberatkan pada aspek keberlanjutan hingga kemandirian masyarakat sesuai kaidah ESG.

“Melalui kendaraan listrik, Pupuk Kaltim semakin meneguhkan posisi sebagai pionir transformasi industri hijau di Indonesia, dan inovasi ini akan terus ditingkatkan kedepannya,” pungkas Ardi Harto Mulyo. (adv)





# PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From **Rp 15.000** nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

## BEBAS PILIH MENU !

\*syarat dan ketentuan berlaku

[www.hotelgrandkartika.com/inspirasi](http://www.hotelgrandkartika.com/inspirasi)





Kepala Bapenda Berau, Muhammad Said.

## Bapenda Ingatkan Masyarakat Bayar Wajib Pajak PBB-P2

**TANJUNG REDEB** - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Muhammad Said mengingatkan kepada seluruh badan usaha atau perusahaan hingga masyarakat untuk patuh dalam membayar wajib pajak.

Pasalnya, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Berau mencapai Rp 15,193 miliar. Itu terhitung lima tahun sejak 2018 lalu.

Yang mana berasal dari badan usaha atau perusahaan 64,62 persen atau Rp 9,817 miliar dan pribadi atau masyarakat 35,38 persen atau Rp 5,375 miliar. Sementara, target serapan tahun ini yakni 85 persen atau Rp 5,500 miliar.

"Sampai semester I tahun 2023 ini baru terealisasi sebesar 30 persen," ungkapnya.

Dijelaskannya, penyebab tunggakan tersebut lantaran pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Kantor Pajak Pratama Tarakan ke Pemerintah Daerah tanpa penghapusan data.

Sehingga tunggakan yang diterima banyak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kesadaran dan dukungan Aparat Kampung/RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 dan mengingatkan warganya untuk membayar PBB-P2 juga masih rendah," jelasnya, Jumat (1/9/2023).

Pihaknya akan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan baik langsung maupun melalui media untuk memberikan edukasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak.

Selain itu juga akan melakukan verifikasi dan validasi atas tunggakan PBB-P2 pada 13 kecamatan di Berau. Serta, melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Berau selaku pengacara negara untuk melakukan pendampingan dalam penagihan pajak.

"Yang tidak kalah penting juga membuat Surat Edaran Bupati yang ditujukan kepada Kepala OPD dan

Camat atau Lurah serta Kepala Kampung agar mempersyaratkan bukti lunas PBB-P2 Tahun berjalan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," terangnya.

Sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan berupa pengelolaan PBB-P2 dengan meluncurkan aplikasi baru yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (SIP-PBB) dimana wajib pajak dapat diakses secara online. Termasuk melakukan pendaftaran dan mencetak SPPT PBB serta dapat melihat tunggakan PBB.

"Kami juga bekerjasama dengan Bank RKUD untuk membuka portal pembayaran guna memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online kapan dan dimanapun berada," tutupnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza  
Editor: Dezwan



Warga Sumber Rejo gelar aksi mimbar bebas menuntut lahan yang dirampas Kodam VI Mulawarman dikembalikan.

## Warga Tolak Pengambilan Lahan oleh Kodam VI/Mulawarman

BALIKPAPAN - Puluhan masyarakat pemilik lahan dan ahli waris berkumpul di kawasan Kelurahan Sumberejo, Balikpapan Tengah, tepatnya di RT 41 dan 42 pada Jumat (1/9/2023).

Mereka berkumpul untuk menunjukkan kepada tim pengukur dari Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan bahwa lahan di RT 41 dan 41 adalah milik mereka dan bukan milik Kodam VI Mulawarman sebagaimana dalam persidangan yang saat ini tengah berlangsung di PN Balikpapan.

Pendamping hukum warga, Ardiansyah, mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan warga terhadap perampasan tanah yang dilakukan Kodam VI Mulawarman terhadap tanah warga dengan total luas 36 ribu meter persegi.

"Yang menggugat berjumlah 27 orang, pemilik asli sebagian sudah meninggal. Tapi ada ahli warisnya semua," ujarnya pada Jumat (1/9/2023).

Menurut Ardiansyah, lahan tersebut dulunya merupakan lahan perkebunan milik warga yang ditanami tumbuhan seperti kelapa sawit, elai, cempedak, nangka, dan lainnya. Namun, pada tahun 1980, tanah warga itu dirampas secara paksa oleh Laksus Pangkopkamtib dengan dalih pinjam pakai kepada Kepala Kampung pada masa itu, yaitu Salepo.

"Pinjam pakai itu cuma sepihak

sama Kepala Kampung untuk dijadikan tempat isolasi tahanan politik eks PKI saat itu," jelasnya.

Isolasi tersebut berjalan selama 2 tahun. Pada tahun 1983, tahanan eks tahanan politik PKI itu direlokasi ke Ambarawang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, tanah yang semula dijadikan perkebunan oleh warga itu tidak dikembalikan kepada masyarakat. Sebaliknya, Laksus saat itu malah menyulap lahan tersebut menjadi perumahan anggota TNI.

"Jaman dulu kan tidak ada yang berani menentang kekuasaan tentara, khususnya TNI AD. Sehingga warga saat itu hanya bisa pasrah," tambah Ardiansyah.

Kemudian pada tahun 1985, perumahan anggota TNI itu selesai dibangun. Tepat pada awal Januari 1985, sejumlah anggota TNI mulai menghuni perumahan tersebut.

Sebagian anggota TNI yang kini telah menjadi purnawirawan kemudian membeli lahan tersebut kepada pemilik lahan pada tahun 2003 dengan cara mencicil pembayaran tersebut hingga lunas.

"Purnawirawan TNI yang menepati lahan tersebut membeli lahan ini dari pemilik asli karena tahu lahan ini bukan milik Kodam," tegasnya.

Sejak awal Januari 2023, warga kemudian melayangkan gugatan ke pengadilan menyusul surat pengosongan rumah yang dihuni para

purnawirawan sejak tahun 2017 hingga Desember 2022. Warga juga memiliki sejumlah bukti kepemilikan atas tanah di kawasan Sumber Rejo ini, termasuk segel, sertifikat, dan akta jual beli.

Sementara itu, Kapendam VI Mulawarman, Kolonel Arm Kukuh Dwi Antono, mengklaim bahwa lahan Kodam VI Mulawarman di kawasan Sumber Rejo adalah milik Kodam dengan total luas 60 ribu meter persegi atau sekitar 6 hektar. Lahan tersebut tercatat sebagai barang milik negara dengan nomor kode KUAKPB/012.22.16.344293.000.KD.

"Nah, disini tercatat ada kurang lebih 121 bangunan," ujarnya.

Kukuh juga mengklaim bahwa Kodam VI Mulawarman memiliki legalitas yang sah atas kepemilikan lahan di Sumber Rejo tersebut dan akan mempertahankan tanah yang menjadi miliknya.

"Kita juga tidak berani jika itu bukan hak kita, bukan hak TNI AD, bukan hak Kodam. Kita juga tidak akan mempertahankannya," jelasnya.

Ardiansyah menambahkan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari penggugat di Pengadilan Negeri Balikpapan. "Tanggal 7 nanti sidang selanjutnya," tutupnya. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto

# DPC Demokrat Turunkan Poster Anies di Balikpapan

**BALIKPAPAN** - Keputusan memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu 2024 oleh Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, telah menciptakan dinamika politik yang menarik, terutama di kalangan kader Partai Demokrat Balikpapan.

Saat Anies selama ini lebih dikenal dengan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, keputusannya untuk memilih Cak Imin dan berpisah dengan AHY telah menimbulkan perdebatan dan refleksi di tingkat daerah. Termasuk Kota Balikpapan.

DPC Demokrat Balikpapan memutuskan untuk menurunkan semua poster dan materi promosi yang berisi tulisan "Anie-AHY."

Ketua DPC Demokrat Balikpapan, Denny Mapa, dalam konfirmasinya pada Jumat (1/8/2023), mengatakan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. "Kami telah memulai proses penghapusan ini sejak malam tadi seiring dengan keputusan yang telah diambil oleh anggota tim koalisi mengenai bakal calon wakil presiden," ujarnya.

DPC Demokrat juga memberikan instruksi kepada seluruh kader, pengurus, dan bacaleg untuk menghentikan branding Anies sebagai Calon Presiden.

"Langkah ini kami lakukan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, dan sementara itu, semua materi yang dihapus akan digantikan dengan konten lain," tambah Denny Mapa.

Menurut Denny Mapa, kabar tentang perubahan sikap Anies yang sebelumnya mendukung AHY dan kini mendukung Cak Imin telah mengecewakan para kader. Terlebih pada tanggal 25 Agustus, Anies diketahui telah mengirimkan surat kepada AHY, memberi sinyal akan menjadi cawapresnya.

"Surat tersebut ada, keputusan ini diambil secara sepihak, kami merasa bahwa Nasdem dan Anies telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dengan mengadakan rapat internal tanpa mengundang anggota koalisi seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera," tutup Denny Mapa.

Penulis: Aprianto  
Editor: Agus Susanto



Ketua DPC Demokrat Balikpapan, Denny Mapa

**JALAN SANTAI  
DALAM RANGKA  
GRAND OPENING GEDUNG NASIONAL**

**JAM 06.00-SELESAI  
MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023**

**GEDUNG NASIONAL SAMARINDA**  
Jl. Panglima Batur No.118, Pelabuhan

SPONSORED BY: ima  
MEDIA PARTNER: KATUJU  
ORGANIZED BY: [Logo]  
SUPPORTED BY: folus

DOORPRIZE  
GUEST STAR: [Photo]  
ZIN LIA  
ZIN WENI

# Masa Sanggahan DCS Ditutup, Tak Ada Tanggapan Diterima KPU Balikpapan

**BALIKPAPAN** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah menutup masa sanggahan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang dimulai sejak Sabtu (19/8/2023) lalu hingga Senin (28/8/2023) pukul 23.59 WITA.

Komisioner KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry, mengatakan bahwa di Kota Balikpapan sejak awal pembukaan untuk memberikan tanggapan terhadap DCS hingga berakhir, tidak ada satu pun tanggapan yang masuk kepada mereka.

"Tidak ada tanggapan yang masuk kepada kami, baik melalui kanal di website maupun media lainnya, kami sudah memberikan kesempatan," ujarnya pada Jumat (1/9/2023).

Mega Fariany Ferry menjelaskan bahwa di Kota Balikpapan terdapat 650 DCS, terdiri dari 399 keterwakilan laki-laki dan 251 keterwakilan perempuan, yang berasal dari 17 partai yang tercatat di KPU Kota Balikpapan.

"Jika kemarin terdapat klarifikasi atau tanggapan terhadap DCS, saat ini kami meminta kepada partai politik untuk melakukan klarifikasi," jelasnya.

Mengingat tidak ada tanggapan yang masuk, KPU Kota Balikpapan hanya akan menunggu pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 November mendatang.

Sebelum memasuki masa tanggapan DCS, yaitu tahap verifikasi administrasi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), terdapat 63 Bacaleg yang harus memperbaiki atau melengkapi persyaratan. Dalam masa itu, terdapat juga satu Bacaleg yang harus diganti oleh partainya.

Meski tidak disebutkan secara rinci, Mega menyatakan bahwa Caleg tersebut merupakan mantan narapidana yang masih belum memenuhi syarat.

"Untuk mantan narapidana, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi jika ingin mencalonkan diri, yang tercantum dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota," tambahnya.

Dalam PKUPU tersebut, aturan untuk mantan narapidana tertera dalam pasal 11 poin (G), yang menyatakan bahwa seorang calon tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Sebagai tambahan, mantan narapidana yang mendaftar sebelumnya telah menjalani hukuman kurang dari lima tahun. Namun, yang penting adalah ancaman hukumannya, bukan masa hukumannya.

"Jadi, berhenti di verifikasi administrasi setelah perbaikan, dan kemudian langsung diganti oleh partai politik karena kami anggap tidak memenuhi syarat," tutupnya.

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Agus Susanto*



**Komisioner KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry.**



Kapolsek Balikpapan Timur, AKBP Puji Purwanto, saat menunjukkan pelaku HA beserta barang bukti parang yang digunakan untuk menganiaya korban.

## Pengukuran Lahan Berujung Penganiayaan, Pelaku di Balikpapan Ditangkap

**BALIKPAPAN-** Pria berinisial HA (56) di Kota Balikpapan ditangkap polisi karena terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berat, yang terjadi pada Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 14.30 WITA.

Kejadian ini berawal di Jalan M Mastroji RT 83 PJHI Dalam, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, ketika seorang saksi bernama Agus Rudiyanto sedang melakukan pengukuran lahan milik korban bernama Karsiyani (41).

Namun, ketika sedang melakukan pengukuran di batas antara lahan korban dan pelaku, Agus ditegur oleh pelaku karena telah memasuki lahan milik pelaku. Agus segera melaporkan insiden tersebut kepada korban. Korban pun datang ke lokasi untuk berbicara dengan pelaku.

"Kemudian terjadi perselisihan dalam pengukuran dan percekocokan mulut antara korban dan pelaku," ujar Kapolsek Balikpapan Timur, AKBP Puji Purwanto, pada Jumat (1/9/2023).

Puji Purwanto menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam perselisihan tersebut, korban mengancam akan mempidanakan pelaku. Akibatnya, pelaku emosi dan segera mengambil sebilah parang yang digantungkan dan mengayunkannya satu kali ke arah pelipis korban.

"Korban terjatuh, kemudian mencoba bangkit, tetapi pelaku kembali menyerangnya satu kali lagi, kali ini mengenai leher korban. Warga yang datang ke lokasi segera mengamankan keduanya," jelasnya.

Korban langsung dibawa ke Puskesmas Manggar oleh warga, semen-

tara pelaku diserahkan kepada petugas Opsnal Polsek Balikpapan Timur yang datang ke tempat kejadian dan mengamatkannya untuk proses hukum selanjutnya.

"Selain mengamankan pelaku, kami juga menyita sebilah parang yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban," tambah Kapolsek Balikpapan Timur.

Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat, dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. **(Bom)**

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Agus Susanto*



SYAKURAH/RADAR BONTANG

Konferensi Pers Pra-launching Implementasi Inovasi Wolbachia untuk Kota Bontang

## Bontang Jadi Pilot Proyek Inovasi Wolbachia untuk Perangi DBD

**BONTANG** - Kota Bontang, yang beberapa tahun terakhir dihantui oleh angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang tinggi, kini berusaha keras untuk berubah dengan mengadopsi inovasi Wolbachia.

Sebagai bagian dari persiapan up-eluncuran "Bontang Berwobachia Serentak" (Bawis) pada 5 September 2023, Pemkot Bontang melalui Dinas Kesehatan Bontang menggelar Konferensi Pers Pra-launching Implementasi Inovasi Wolbachia untuk Kota Bontang di Public Safety Center, Jumat (1/9/23).

Inovasi ini merupakan upaya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengurangi populasi nyamuk *Aedes aegypti* di wilayah tertentu, dengan harapan dapat mengurangi kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD).

Peluncuran Implementasi Inovasi Wolbachia di Kota Bontang akan berlangsung di area parkir Bontang Kuala. Kota Bontang dipilih sebagai lokasi pilot proyek inovasi Wolbachia DBD yang mewakili Kaltim, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1341 Tahun 2022 men-

genai penyelenggaraan proyek teknologi Wolbachia di lima kota, yakni Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang.

Toetoeek Pribadi Ekowati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, menyatakan bahwa Bontang terpilih sebagai pilot proyek ini karena Kota Bontang adalah daerah endemis DBD dengan tingkat kasus yang tinggi.

"Setiap tahun, terdapat kasus kematian akibat DBD di Kota Bontang. Pemerintah Kota Bontang telah menunjukkan komitmen seriusnya dalam upaya pengendalian DBD," bebernya.

Program ini akan dilaksanakan di seluruh kelurahan Kota Bontang, terbagi dalam dua tahap. Enam kelurahan pada tahap pertama, diikuti sembilan kelurahan pada tahap berikutnya.

Ini menjadi ciri khas pelaksanaan inovasi Wolbachia di Kota Bontang dibandingkan dengan kota lain yang terlibat dalam proyek serupa.

Sebagai program nasional, pendanaan implementasi inovasi Wolbachia di Kota Bontang bersumber dari pemerintah pusat, Anggaran Pendapa-

tan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber daya potensial lainnya di Kota Bontang, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR).

"Hingga saat ini, jumlah dana yang telah dialokasikan mencapai sekitar 1 miliar rupiah," ungkapnya.

Adi Permana, epidemiolog muda, menjelaskan bahwa Wolbachia akan diperkenalkan di 4.911 lokasi di seluruh Kota Bontang. Jumlah ini telah dihitung dengan radius 75x75 meter untuk setiap kelurahan.

"Kami akan menempatkannya di daerah yang memiliki pemukiman, termasuk sekolah dan perkantoran, sementara pabrik dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit tidak akan terlibat," katanya.

Daerah pesisir seperti Malahing dan Tihi-tihi juga akan menjadi bagian dari program ini. Tahap awal pelaksanaan akan berlangsung selama enam bulan hingga Mei 2024, dan akan membutuhkan sekitar 1,6 juta telur nyamuk untuk proses perkembangbiakan.

Penulis: Syakurah  
Editor: Agus Susanto

# Wolbachia Bekerja untuk Reduksi Demam Berdarah Dengue, Begini Cara Kerjanya

**BONTANG** – Konferensi pers pra-launching implementasi inovasi Wolbachia untuk Kota Bontang pada Jumat (1/9/23) di Public Safety Center mengungkap cara kerja Wolbachia dalam mengurangi Demam Berdarah Dengue (DBD).

Epidemiolog muda yang ahli, Adi Permana, menjelaskan bahwa Wolbachia adalah bakteri alami yang dapat ditemukan pada 70 persen spesies serangga, termasuk lalat buah, lebah, kupu-kupu, dan lainnya. Oleh karena itu, bakteri ini bukan bakteri baru, dan kemungkinan kita sudah “mengonsumsi” bakteri ini tanpa disadari.

Bakteri ini aman bagi manusia, sehingga tidak mungkin menyebabkan infeksi pada manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 telah mengkaji analisis risiko yang melibatkan 24 ahli independen dari berbagai latar belakang keahlian di Indonesia.

“Bakteri tersebut diekstraksi dan disuntikkan ke telur nyamuk. Proses ini pertama kali dilakukan di salah satu universitas di Australia,” jelasnya.

Kemudian, mereka bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Indonesia, dan kegiatan tersebut dilanjutkan di Indonesia. Setelah berhasil disuntikkan ke telur nyamuk, Wolbachia akan ada secara turun temurun pada nyamuk, khususnya *Aedes aegypti*.

Telur nyamuk *Aedes aegypti* kemudian dikirim dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga ke Bontang. Telur ini akan berkembang menjadi nyamuk dewasa secara alami. Nyamuk betina berwolbachia yang kemudian berkawin dengan nyamuk jantan akan menghasilkan telur nyamuk berwolbachia.

“Nyamuk-nyamuk dewasa berwolbachia, atau yang kita sebut sebagai nyamuk baik, akan terus berkembang

baik. Diharapkan nantinya seluruh nyamuk *Aedes aegypti* di Bontang mengandung Wolbachia,” jelasnya.

Dalam proses perkembangbiakan ini, akan ada kader-kader yang ditunjuk oleh kelurahan untuk meletakkan ember yang berisi telur nyamuk *Aedes aegypti* yang berwolbachia. Mereka akan secara berkala, setiap dua minggu, mengganti air dalam ember tersebut dan memastikan telur nyamuk menetas. Karena nyamuk berwolbachia memiliki umur pendek, setelah menetas dan terbang, mereka harus segera berkawin untuk menyebarkan bakteri Wolbachia ini.

Dibutuhkan dukungan dari pemerintah, lintas sektor, perusahaan, dan masyarakat untuk menjadi lokasi atau penitipan ember penetasan nyamuk berwolbachia.

“Sebelum peluncuran, beberapa tahap kegiatan telah dilakukan, termasuk sosialisasi tingkat kecamatan dan kelurahan, pra-Orientasi Kerja Lapangan (OJT) Koordinator Lapangan (Korlap), dan OJT Sosialisasi Implementasi Tingkat Kecamatan,” tambahnya.

Setelah peluncuran, program ini akan dilanjutkan dengan OJT untuk korlap dan kader, pemetaan lokasi penitipan ember nyamuk baik, dan pelepasan telur nyamuk berwolbachia. Pelepasan tahap awal atau tahap I akan dilakukan di 6 kelurahan pada minggu ke-4 September 2023.

Tahap berikutnya akan dilakukan pada akhir Desember 2023.

Proses penyebarannya dianggap cukup lama, sekitar 6 bulan, karena nyamuk berkembangbiak secara alami. Diharapkan dalam satu tahun ke depan, jumlah populasi nyamuk baik atau nyamuk berwolbachia sudah mencapai 80% dari populasi nyamuk *Aedes aegypti* di Bontang.

Hasil implementasi inovasi Wolbachia di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul selama periode 2017-2020 mampu mengurangi kasus DBD hingga 77% dan mengurangi angka pasien yang dirawat hingga 86%.

Isnadhon Sokeh dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Wilker Bontang menjelaskan bahwa tim akan melakukan identifikasi terhadap jentik atau nyamuk dewasa yang sudah menyebar di lingkungan Kota Bontang yang telah diberikan ember jentik tersebut. Tim akan memilah mana nyamuk yang termasuk *Aedes aegypti*, mana yang betina, dan mana yang jantan. Nyamuk terpilih akan dikirim ke laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) di Banjarbaru untuk diperiksa.

“Dengan pemeriksaan tersebut, kami akan menentukan efektivitas program selama berlangsung,” ungkapnya.

*Penulis: Syakurah*

*Editor: Agus Susanto*





## Ardiansyah Ajak Sukseskan Pemilu 2024, Kutim Siapkan Asuransi Petugas

**SAMARINDA** - Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Ballroom Hotel Mercure pada Rabu (30/8/2023) lalu, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut sangat penting. Dalam rapat tersebut, semua pihak diminta terlibat untuk mensukseskan Pemilu Serentak tahun depan, termasuk seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada. Hal ini sejalan dengan tujuan dari rapat tersebut, yaitu pembinaan dan pemberdayaan ormas untuk mendukung kesuksesan Pemilu Serentak 2024.

Ardiansyah menekankan bahwa pemilu serentak harus berjalan dengan baik, aman, tertib, dan menghasilkan sesuatu yang positif bagi

masyarakat serta demokratis bagi semua pihak.

"Kehadiran semua unsur Forkopimda se-Kaltim, ormas, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilu sangat penting untuk menyatukan visi misi dalam mensukseskan pesta demokrasi di Kaltim maupun di Indonesia secara keseluruhan," tegasnya.

Selanjutnya, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kaltim dan pihak lainnya atas dukungan mereka. Terkait pelaksanaan pemilu, pemerintah daerah sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan penyelenggara pemilu.

"Pemkab Kutim telah memprogramkan asuransi bagi penyelenggara pemilu guna meningkatkan keselamatan mereka serta mencegah kejadian meninggalnya penyelenggara pemilu saat pemungutan su-

ara. Asuransi tersebut akan diberikan kepada PPK, PPS, dan petugas TPS," urainya.

Selain itu, Ardiansyah mengungkapkan bahwa akan memaksimalkan peran Badan Kesbangpol Kutim dalam memfasilitasi sosialisasi informasi hasil rapat ini kepada ormas lainnya. Hal ini bertujuan agar ormas juga dapat turut serta dalam mensukseskan pemilu.

Terakhir, Ardiansyah berharap agar Pemilu Serentak 2024 dapat terlaksana dengan sukses.

"Warga masyarakat dapat menyampaikan hak suaranya dengan lancar, hasil pemilu sesuai dengan harapan masyarakat, dan situasi keamanan tetap kondusif," tutupnya. (Rkt1)

*Editor: Agus Susanto*





Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi dan Pengurus Apkasindo Paser 2023-2028.

## APKASINDO Ditantang Undang Investor Dirikan Pabrik Minyak Goreng di Paser

**PASER** - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, meminta agar wadah bagi petani kelapa sawit dapat berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup petani menuju kesejahteraan.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) 2023-2028 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) Kabupaten Paser. "Dengan terbentuknya jajaran yang baru ini, kedepannya semakin berkembang," katanya.

Politisi PKB ini juga berharap bahwa APKASINDO dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, guna menjalankan Program Sawit Rakyat (PSR) atau yang biasa dikenal sebagai program replanting di Kabupaten Paser.

Kabupaten Paser telah dikenal sebagai salah satu wilayah dengan penerapan program terbaik di Indonesia. "Tentu saja ini merupakan pencapaian luar biasa atas kerja sama mereka, bersama pemerintah. Kami terus mendukung kelancaran program ini agar menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Tak hanya itu, dari segi pendapatan, ia menganggap pentingnya APKASINDO turut berkontribusi dalam mengundang investor dari luar untuk membangun pabrik minyak goreng, yang hingga kini belum ada di Kabupaten Paser.

"Kami berharap APKASINDO dapat menarik investor untuk membangun pabrik minyak goreng, yang selama ini menjadi harapan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Timur, Betman

Siahaan, mengungkapkan bahwa Kabupaten Paser merupakan daerah pertama yang mengajukan program PSR sejak tahun 2016. Meskipun mengalami beberapa kegagalan, APKASINDO terus berupaya untuk mewujudkan program ini.

Siahaan juga berharap bahwa pengurus yang baru akan melanjutkan semua perjuangannya, termasuk dalam mengurus sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bagi setiap petani yang mengikuti program PSR.

"Jadi pembiayaan ISPO akan ditanggung langsung melalui program PSR," katanya.

Pewarta: Bhakti Sihombing  
Editor: Agus Susanto



Lokasi sawah di Kabupaten Paser.

## Paser Siapkan 13.000 Hektare Lahan Cetak Sawah untuk Dorong Ketahanan Pangan di IKN

**PASER** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tengah mempersiapkan diri untuk ketahanan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terlebih Kabupaten Paser merupakan daerah yang berdampingan dengan IKN Nusantara.

Bupati Paser, Fahmi Fadli menyampaikan, Pemkab Paser bakal melakukan cetak sawah pada tahun 2024. "Rencana akan dilakukan cetak sawah di lahan seluas 9 sampai 13 ribu hektar, untuk kesiapan ketahanan pangan," terang Fahmi.

Meski demikian, tak menutup kemungkinan luasan lahan tersebut bakal bertambah jika usulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melalui Balai

Konservasi Sumber Daya Alam (BKS-DA) Provinsi Kaltim disetujui.

Pasalnya, beberapa lokasi yang juga potensi untuk peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Paser masuk dalam kawasan cagar alam. "Jika usulan itu bisa berhasil, maka kemungkinan perluasan cetak sawah bisa bertambah," tambahnya.

Fahmi mengaku, berbicara soal ketahanan pangan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi melainkan dari semua sisi. Diungkapkan, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi mengenai ketahanan pangan.

"Seperti halnya kesiapan dari segi infrastruktur jalan maupun jembatan, hingga pada kesiapan lahan serta

sumber daya manusia," ulasnya.

Ia berkomitmen akan mempersiapkan secara perlahan hal-hal yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan pangan di IKN Nusantara. Untuk diketahui, rencana tersebut juga selaras dengan RKPD Kabupaten Paser tahun 2023.

"Tentunya kita harus memikirkan kesiapan pangan kedepannya, saya sudah minta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Paser untuk mele-takkan lahan pertanian kita di Paser," pungkasnya.

*Pewarta: Bhakti Sihombing  
Editor: Agus Susanto*



Penanggulangan Karhutla di Kabupaten Paser.

## DLH Paser Sebut Indeks Kualitas Udara Tetap Baik di Tengah Kebakaran Hutan dan Lahan

**PASER** - Di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser memastikan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih relatif baik.

Hingga saat ini, kasus Karhutla yang terjadi sejak 30 Juli hingga 27 Agustus 2023, berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser tercatat sebanyak 29 kasus dengan luasan yang terbakar mencapai 140,3 hektare di 5 Kecamatan.

"Kondisi udara kita belum ada informasi dari DLH Provinsi Kaltim. Berarti kategorinya masih relatif baik," ungkap Kepala DLH Kabupaten Paser, Achmad Safari dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Dijelaskan Safari, pengujian quali-

tas udara menjadi agenda rutin DLH Kabupaten Paser. Biasanya dilakukan setiap semester tiap tahunnya. Data terbaru, sebelum musim kemarau panjang atau masa transisi, hasilnya relatif bagus.

Memasuki musim kemarau ini, biasanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan DLH Provinsi Kaltim memberikan peringatan atau informasi kepada DLH di setiap Kabupaten, termasuk Paser.

"Jika ada wilayah dengan kategori kondisi polusinya buruk. Tapi untuk wilayah Kaltim sampai hari ini belum ada," urai Safari.

Kabupaten Paser, kata Safari, memiliki alat pendeteksi kualitas udara dengan metode passive sampler. Alat ini dipasang pada satu tit-

ik di suatu tempat selama 14 hari. Setelah itu diambil dan diuji di laboratorium.

"Pemasangan alat ini sudah dilakukan menjelang kemarau panjang atau masa transisi akhir Juni 2023," beber Safari.

Sejauh ini, tutur Safari, telah ada imbauan kepada pelaku usaha di daerah, baik perkebunan maupun pertambangan, untuk berhati-hati dan secara bersama-sama mengantisipasi kemarau.

"Kami sudah mengumpulkan para pelaku usaha untuk selalu siaga dan mengantisipasi terjadinya kebakaran," tutup Safari.

*Pewarta: Bhakti  
Editor: Agus Susanto*



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Suasana pertemuan virtual antara Pemkab PPU dan Tim KPK RI, Kamis (1/9/2023).

## PPU Terpilih Jadi Calon Lokasi Penganugerahan Desa Antikorupsi Indonesia 2023

PPU - Penajam Paser Utara (PPU) telah terpilih sebagai salah satu calon lokasi untuk Penganugerahan Desa Antikorupsi se-Indonesia tahun 2023. Seperti penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat negara yang baru, PPU dipilih karena letak geografisnya yang berada di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku juga telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Antikorupsi 2023. Desa yang akan masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ini berhasil memenuhi lima syarat yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dengan ditetapkannya Desa Tengin Baru, Provinsi Kalimantan Timur akan diwakili oleh desa ini sebagai desa antikorupsi setelah melalui seleksi ketat. Desa Tengin Baru bergabung dengan 81 desa dari 22 provinsi yang masuk dalam daftar

nomominasi desa anti korupsi se-Indonesia tahun ini.

Ketua Tim Penilaian Desa Antikorupsi KPK, Nurtjahyadi, mengungkapkan bahwa Desa Antikorupsi ini akan diluncurkan pada akhir November 2023 di Kantor Desa Tengin Baru. Penetapan PPU sebagai tuan rumah peluncuran ini telah melalui pertimbangan yang panjang, terutama berkaitan dengan unsur masyarakat dan budaya lokal. PPU dipilih karena posisinya yang dapat mengakomodir semua wilayah di Indonesia.

Nurtjahyadi menjelaskan, "Jika peluncuran dilakukan di Aceh, maka yang berada di Papua akan terlalu jauh. Begitu pula jika dilakukan di Maluku, maka yang berada di Aceh atau Sumatera Utara juga akan jauh. Akhirnya, dipilihlah lokasi yang dapat menjadi pilihan bagi semua." Provinsi-provinsi lain yang masuk dalam nominasi antara lain Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Program Desa Antikorupsi melalui empat tahap, yakni tahap observasi, tahap bimbingan teknis (Bimtek), tahap penilaian, dan tahap penghargaan. Dalam tahap observasi, desa-desa yang terpilih dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi indikator Desa Antikorupsi.

Sekcab PPU, Tohar, menyatakan bahwa Pemkab PPU siap mendukung peluncuran ini. Mereka akan mengkonsolidasikan rencana, mengidentifikasi lokasi dan persiapan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan ini.

Tohar menekankan akan berupaya mendukung sebaik mungkin inisiatif yang diambil oleh KPK dalam acara ini. "Kami berharap bahwa rencana kegiatan ini dapat berhasil untuk memfasilitasi peluncuran Desa Antikorupsi di Kabupaten PPU nantinya," pungkasnya.

Pewarta: Nur Robby Syai'an  
Editor: Agus Susanto



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kegiatan Jumat Curhat Polda Kaltim digelar di Balai Pertemuan Awa Bapekat Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (1/9/2023).

## Warga Sepaku Curhat Kekhawatiran Pemindahan IKN ke Polda Kaltim

PPU - Berbagai kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Sepaku atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terungkap. Langsung di depan jajaran Polda Kaltim dalam sesi Jumat Curhat yang digelar di Desa Tengin Baru, Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (1/9/2023).

Disampaikan Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro, dalam proses pemindahan IKN mendengarkan aspirasi masyarakat PPU sangat dibutuhkan. Agar sinergitas masyarakat khususnya warga Kecamatan Sepaku dapat selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Banyak berita sentimen negatif dalam pemberitaan di awal IKN namun sebenarnya banyak dampak

positifnya dari pembangunan IKN ini di Indonesia. Kami mengajak seluruhnya bersama-sama untuk menjaga kamtibmas," ujarnya.

Dalam sesi Jumat Curhat, seluruh petinggi Polda Kaltim, Polres PPU dan seluruh Polsek di PPU mendengarkan

dan juga menerima masukan-masukan yang hadir. Termasuk para aparat Kecamatan Sepaku, desa-desa di Sepaku serta para tokoh masyarakat.

Salah satunya adalah Ketua LPM Desa Tengin Baru, Tasmah yang menyebutkan bahwa perpindahan IKN berdampak positif bagi wilayahnya. Yakni adanya peningkatan dari sisi perekonomian masyarakat.

"Namun sisi negatifnya banyak warga dari luar yang berdatangan

yang mungkin belum terdata. Kami harap situasi bisa tetap aman dan kondusif," ucapnya.

Soal itu, Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro menanggapi dengan mendorong terbentuknya satuan keamanan lingkungan (satkamling) di masing-masing RT. Yang bertugas pokok menjaga kamtibmas.

"Kami sudah menyampaikan untuk perlunya tenaga pengamanan dalam menjaga lokasi perusahaan juga. Dengan ketentuan minimal Garda Pratama agar memiliki Kompetensi yang mumpuni," ungkapnya.

Selanjutnya, banyak kekhawatiran masyarakat yang berkaitan dengan urusan agraria. Seperti Ketua Rapi Kecamatan Sepaku Mauladin menyampaikan permasalahan pemukiman

sertifikat bagi warga transmigrasi.

Di mana sejak tahun 1977 lahan yang digunakan sampai sekarang masih banyak permasalahan. "Seperti saat pembayaran ganti rugi yang berbeda. Kemudian dahulu banyak warga transmigrasi yang pergi kemudian kembali dan saat ini karena hadirnya IKN kembali mencari lahannya," ungkapnya.

Lalu juga Kasi Pemerintahan Kelurahan Sepaku menyampaikan adanya pembebasan lahan pembangunan Nasional yang harus dikawal hingga tuntas. "Kemudian banyak warga menanyakan bagaimana masuk kerja di IKN," sebutnya.

Selain itu juga, banyak ditanyakan terkait ganti-untung lahan di masing-masing desa. Termasuk adanya beberapa warga pemilik lahan yang telah lama meninggal dunia. Pun ada juga masalah pembebasan lahan yang masih terganjal aturan.

Untuk urusan berkaitan dengan itu, Roni Pontow yang mewakili Deputi

Pengendalian Pembangunan Otorita IKN dalam tanggapannya mengatakan, land freezing dilakukan untuk mengendalikan agar tidak terjadi sengketa lahan seperti di Jakarta. Di mana Saat ini ada sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah ditetapkan oleh Otorita sesuai peruntukan wilayahnya. Land freezing adalah proses pembatasan hukum atas penjualan atau pengalihan tanah.

"Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih tanah pada saat dilakukan pengadaan tanah pembangunan IKN," jelasnya.

Selain itu, hal tersebut dilakukan agar tidak ada mafia tanah yang memanfaatkan dan mempersulit proses pengadaan tanah sehingga dapat merugikan pemilik tanah. Begitu pula dengan proses perizinan, saat ini sudah dalam proses pembuatan aturannya, sehingga kedepan kepengurusan izin dapat dilakukan melalui aplikasi elektronik.

"Tahun depan otorita sudah mu-

lai full bekerja. Dan apa yang sudah disampaikan masyarakat di sini akan menjadi bahan kami, di mana masyarakat sudah menunggu dan mendukung pembangunan IKN," ucapnya.

Lalu Bidang Sengketa Tanah Kanwil ATR BPN Kaltim, Muhammad Aidi menambahkan, rata-rata ada persoalan permasalahan lahan transmigrasi. Di mana legalitas dan fisiknya tidak sesuai lokasi.

"Persoalan lahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi harus diselesaikan bersama dengan para pemilik lahan. Untuk permasalahan lahan melibatkan para pihak masyarakat, bisa dilakukan mediasi, karena jika tidak ada yang mengalah maka tidak dapat kita selesaikan," pungkasnya.

Pewartu: Nur Robby Syai'an  
Editor: Agus Susanto

TOYOTA LET'S GO BERTAMBAH

SABTU

# SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

TOYOTA MOTOR OIL

## Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE  
PALING HEMAT  
GUARANTEE

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Drusen Toyota lebih mudah!

AUTO 2000  
member of ASTRA

Bontang



Ketua Demokrat Kaltim, Irwan

## Irwan: Demokrat Keluar dari Koalisi, Tidak Dukung Anies Baswedan

**SAMARINDA** - Partai Demokrat dengan tegas mengumumkan keputusan untuk meninggalkan Koalisi Perubahan Persatuan, sebagai respons atas keputusan Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

Wakil Sekretaris DPP Demokrat sekaligus Ketua Demokrat Kaltim, Irwan, mengumumkan keputusan ini pada Jumat (1/9/2023). Irwan menegaskan bahwa DPP Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan Persatuan dan akan mencari mitra koalisi yang baru, sambil menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan.

"Iya, Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan persatuan. Kami meninggalkan koalisi ini dan tidak akan mendukung Anies Baswedan, yang dianggap tidak jujur dan telah melanggar komitmen serta berkhianat terhadap apa yang telah diajanjikan," tegas Irwan.

Irwan menjelaskan bahwa nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

sebagai calon wakil presiden sudah disetujui oleh seluruh ketua umum partai yang ada di koalisi (NasDem, PKS, Demokrat). Bahkan pada tanggal 25 Agustus 2023, Anies mengirimkan surat persetujuan secara tertulis untuk mengusung AHY sebagai cawapresnya.

Namun, dalam kurun 5 hari kemudian, Anies melakukan pertemuan diam-diam dan mencapai kesepakatan untuk memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini disampaikan melalui utusan tengah malam kepada pihak Demokrat.

"Kami bersyukur bahwa keputusan ini terungkap lebih awal. Kita perlu pemimpin yang dapat dipercaya, yang memegang teguh komitmennya. Selama ini di dalam koalisi, kami tidak pernah memaksakan AHY sebagai cawapres. Malah, permintaan Anies yang akhirnya dia sendiri khianati," ungkap Irwan.

Irwan menekankan bahwa dalam pencarian mitra koalisi yang baru, Demokrat tidak akan tergesa-gesa. Mereka telah melakukan komunikasi dengan partai di luar koalisi, seperti

PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.

"Komunikasi dengan partai lain adalah hal yang wajar dan tidak dilarang. Demokrat telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Pak Prabowo, dikunjungi oleh Pak Airlangga, Cak Imin, dan juga Mbak Puan," lanjutnya.

Irwan menjelaskan bahwa DPP Demokrat juga telah memberikan instruksi untuk menghentikan segala bentuk promosi terhadap Anies. Seluruh atribut yang berkaitan dengan Anies diminta untuk diturunkan. Yang pasti, Irwan menegaskan bahwa Demokrat, khususnya di Kaltim, akan memperkuat konsolidasi internal pasca keputusan Anies yang dinilai sebagai pengkhianatan.

"Yang pasti, saat ini kami berfokus pada mendukung semangat kader-kader yang merasa kecewa dan merasa dikhianati, sehingga setelah keluar dari koalisi, kami akan memperkuat konsolidasi internal," tutupnya.

Pewarta: Andi Desky  
Editor: Agus Susanto



## Tiga Kesenian dari Kukar Dapat Pengakuan Nasional, Ditetapkan Jadi Bagian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia

**SAMARINDA**-Kesenian tradisional dari Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Jatung Utang, Mecaq Undat, dan Kuda Gepang, mendapatkan pengakuan tingkat nasional sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTKBI) pada tahun 2023.

Keputusan ini diambil dalam Sidang WBTKBI yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 30 Agustus 2023, yang dipimpin oleh Tim Ahli Cagar Budaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Dalam upaya memperkenalkan dan melindungi kebudayaan asli Indonesia, Kementerian telah menganugerahkan status WBTKBI pada beberapa kesenian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia.

Kukar, sebagai salah satu kabupaten di Kaltim, berhasil mengirim lima perwakilannya, termasuk tiga mae-

stro budaya dan dua perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

"Kami sangat bersyukur karena ketiga kesenian dari Kukar, yaitu Jatung Utang, Mecaq Undat, dan Kuda Gepang, telah diakui sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Ini adalah prestasi luar biasa untuk wilayah kami," Awang Rifani, seorang budayawan terkemuka dari Kukar.

Kesenian Jatung Utang adalah jenis musik tradisional Suku Dayak Kenyah, yang menggunakan alat musik kayu berbentuk gambang dan masuk dalam kategori alat musik Xilofon.

Sementara itu, Mecaq Undat adalah sebuah upacara adat yang dilaksanakan oleh Suku Dayak Kenyah untuk merayakan musim panen padi.

Secara harfiah, Mecaq Undat berasal dari bahasa Dayak Kenyah yang berarti menumbuk beras sehingga menjadi tepung.

Selain itu, Kuda Gepang, yang merupakan bagian dari seni Kuda Lumping, adalah tarian yang dilakukan dengan menggunakan Eblek, anyaman bambu berbentuk hewan kuda, dalam sebuah barisan tarian yang memukau.

Pengakuan nasional ini menandai langkah penting dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia yang beragam.

Hal ini juga dapat membantu mendukung sektor pariwisata dan membawa perhatian lebih banyak orang kepada keindahan dan keunikannya.

*Pewarta: Hanafi*

*Editor: Agus Susanto*





## PKB Terima Lamaran Partai NasDem, Anies - Cak Imin Akan Deklarasi dalam Waktu Dekat

**SAMARINDA** - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB telah menerima lamaran dari Partai NasDem yang menawarkan pasangan Anies - Cak Imin sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, saat hadir dalam rapat Pleno Diperluas DPP PKB di Surabaya pada Jumat (1/9/2023).

Syafruddin menjelaskan bahwa keputusan menerima tawaran dari NasDem ini diambil setelah pertemuan yang melibatkan Badan Otonom, Anggota Fraksi, Dewan Syuro, Dewan Tanfisz, dan Ketua DPW PKB di seluruh Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa deklarasi pas-

angan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden akan segera dilakukan pada bulan September ini.

Udin, panggilan akrab Syafruddin, menjelaskan bahwa NasDem dipilih karena tawarannya dianggap paling konkret. Ia menyatakan, "Mereka menawarkan paket Anies - Gus Muhaimin secara langsung. Ini merupakan bukti bahwa tawaran tersebut sudah berada dalam penantian selama satu tahun sembilan belas hari karena tertunda oleh Gerindra."

Udin, bagaimanapun, tidak merinci nasib koalisi yang sebelumnya melibatkan PKB. Ia menyatakan bah-

wa pembahasan mengenai koalisi masih dalam lingkup pembahasan internal PKB.

Seperti yang sudah diketahui, PKB sebelumnya bergabung dengan Partai Gerindra dan PAN dalam deklarasi Prabowo sebagai calon presiden belum lama ini di Museum Proklamasi.

Udin menegaskan bahwa PKB siap untuk menjalankan keputusan partai di tingkat daerah, sambil menyatakan, "Rencana pelaksanaan di bawah ini sedang dirumuskan. Kami akan segera merampungkannya. Yang pasti, PKB akan fokus pada pelaksanaan tugas sesuai perintah dan keputusan partai." (eky)

Koran DIGITAL  
MEDIA KALTIM.com  
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0811 5405 033

media\_kaltim    mediakaltimdotcom    mediakaltim.com    media kaltim

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Bigun Kalimas No. 116A, Sebelang Nc, Bontang Baru, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

**BOOKING THS SAJA**

**BTS**  
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA\*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

**Kode Promo BTSOLI**

\*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang